

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2010: 276) definisi kajian pustaka adalah bahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian.

2.1.1 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pihak internal perusahaan yang bertugas mengurus perusahaan dan memberi suatu keputusan dalam menentukan tindakan, dewan direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan bersamasama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan (Walace dan Zinkin dalam Santoso, 2015).

2.1.1.1 Definisi Dewan Direksi

Menurut Kuswiranto (2016:29) menyatakan bahwa :

“Dewan direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengendalian, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Semakin banyak Dewan Direksi akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Wijayanti, S., & Mutmainah, S. 2012).

Definisi Dewan direksi menurut Effendi (2016:26- 27) yaitu :

“Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang diketahui oleh presiden direktur. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris”.

Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan dewan direksi yaitu :

“Merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kegiatan operasional dan kepengurusan dalam melaksanakan kepentingan serta pencapaian tujuan perusahaan, dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator, dan pihak legal, sehingga dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari para investor (Suryastuti, A. T. 2017).

Menurut peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan dalam menerapkan struktur tata kelola yang baik, dengan menentukan jumlah anggota dewan direksi. Anggota dewan direksi minimal terdiri dari 2 orang anggota yang satu diantaranya menjadi direktur utama atau presiden direktur.

Berdasarkan data dan informasi yang telah peneliti peroleh, didapatkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang menunjukkan jumlah dewan direksi telah memadai tetapi kinerja dewan direksi masih perlu diperbaiki yang ditandai dengan

frekuensi rapat tahunan yang masih belum terpenuhi. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat seberapa besar pengaruh dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan.

2.1.1.2 Indikator Dewan Direksi

Menurut Sutedi (2012 : 112) menyatakan bahwa :

“Dewan direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan tertentu. Dewan direksi adalah dewan yang bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan”.

Menurut Rohmansyah (2017 : 54) menyatakan bahwa :

“Dewan direksi merupakan pihak dalam perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan operasional dan kepengurusan perusahaan. Pengukuran dewan direksi dapat diukur dengan melihat jumlah total anggota dewan direksi”.

$$Dewan\ Direksi = \sum Aggota\ Dewan\ Direksi$$

Rohmansyah (2017 : 54)

Faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya jumlah dewan direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Alasan tersebut misalnya yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi menurut UUPT, antara lain melakukan

tindakan yang merugikan PT atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Kemudian, keputusan RUPS pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika keputusan dari musyawarah itu tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah suara yang lebih tinggi.

2. Masa Berlakunya Jabatan

Berakhirnya jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mulai berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS;
- b. tanggal keputusan circular resolution; tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS; atau
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan circular resolution.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dinilai dari besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan menjadi sorotan publik yang diikuti dengan semakin banyaknya informasi yang dapat diterima oleh publik sehingga manajemen campur tangan dalam pembuatan laporan keuangan eksternal yang akan menurunkan integritas laporan keuangan (Mulyanto dan Budiono, 2014)

2.1.2.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Hery (2017:97) mengungkapkan definisi Ukuran Perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan.

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282), menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat mengklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain), penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan”.

Definisi ukuran perusahaan menurut Suripto (2015:8) adalah Perusahaan yang lebih besar kemungkinan mempunyai portofolio pasar yang lebih, karenanya mempunyai kemungkinan kebangkrutan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan akan berpengaruh positif terhadap *debt level*.

Menurut Paramita dan Isarofah (2016 : 56) menyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan perusahaan untuk mengklasifikasikan besar atau kecil melalui berbagai cara diantaranya total aset, *log size*, nilai pasar saham, dan lain – lain”.

Putu Ayu dan Gerianta (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari total aset.

2.1.2.2 Kriteria Ukuran Perusahaan

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Hery (2017:97) mengungkapkan ukuran perusahaan ada 3 yaitu :

- 1) Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.
- 2) Perusahaan Menengah Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta -10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 2,5 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.
- 3) Perusahaan Kecil Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan maksimal Rp 2,5 Milyar/tahun.

2.1.2.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Log Natural Total Aset* dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan *log natural*, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya (Pramana, I. G. A. N. A., & Mahardika, D. P. K. 2019).

Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar, semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu (Dewi, I. G. A. R., Rahindayati, N. M., & Peranakusuma, M. L, 2019).

Firm Size diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan Log Natural Total Aset. Dengan menggunakan log natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya (Werner R. Murhadi, 2013).

Menurut Jogianto Hartono (2016:685) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln (Total\ Asset)$$

Jogianto Hartono (2016:685)

2.1.3 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam membangun kelangsungan perusahaan. Mengingat pentingnya fungsi laporan keuangan tersebut, manajemen perusahaan perlu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi nilai integritas.

2.1.3.1 Definisi Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berguna mengetahui kondisi ekonomis perusahaan, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi sehingga sangat penting jika laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan yang berintegritas terutama pada perusahaan yang *go public* (Dewi, Ni Kadek H. S., & Putra, I. M. P. D. 2016).

Laporan keuangan yang berintegritas adalah laporan keuangan yang berkualitas, Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan (Suhayati, 2014).

Menurut Harahap (2018:105) menyatakan Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Menurut Hery (2014:3) mengatakan bahwa :

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Hanafi dan Halim (2014:49) menyatakan

“Laporan keuangan perusahaan adalah sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industry, kondisi perekonomian, kualitas manajemen dan lainnya”.

Menurut Mulyadi yang dikemukakan oleh Astria (2011) definisi Integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.

Menurut Idialu (2014:314) menyatakan bahwa :

“Word integrity refersto the qualities of complete, unbroken, unimpaired, sound, honest and sincere and went further to state that accounting information must have these qualities because of the significance of the information to individuals who rely on it in making important financial decisions”.

Menurut Mayangsari 2013 dalam Rubiyanto, et.al (2019 : 352) Integritas laporan keuangan didefinisikan sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar.

Istiantoro, Paminto, dan Ramadhani (2017) mendefinisikan bahwa integritas laporan keuangan merupakan suatu penyajian serta pengungkapan

laporan keuangan yang berisikan data-data akuntansi yang mampu menggambarkan realitas sesungguhnya dari ekonomi perusahaan yang diungkapkan dengan jujur tanpa ada yang ditutupi.

Konservatisme digunakan sebagai pengukuran integritas laporan keuangan karena dapat memprediksi kondisi di masa mendatang yang sesuai dengan tujuan perusahaan serta karakteristik informasi dengan prinsip konservatisme dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan integritas laporan keuangan (Arista et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan harus menunjukkan informasi yang benar, jujur, akurat, serta bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang disengaja oleh pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya.

2.1.3.2 Indikator Integritas Laporan Keuangan

Menurut Sri Wahyuni dan Fitriany (2010: 9) mengatakan bahwa :

“Integritas laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan indeks konservatisme, tingkat konservatisme dalam laporan keuangan dimana nilai aset *understatement* dan kewajiban *overstatement* dapat diketahui dengan menggunakan *Market to Book Ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan, rasio yang bernilai lebih dari 1 mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya”.

Menurut Mokhammad Anwar (2019:178) *Market to Book Ratio*

merupakan perbandingan harga pasar saham dengan nilai buku saham,

semakin tinggi *Market to Book Ratio*, berarti harga pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya.

Adapun Rumus *Market to Book Ratio* yaitu :

$$MBV = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Mokhammad Anwar (2019:178)

Menurut Dewianawati (2022 : 11) Faktor yang dapat mempengaruhi *Market to Book Ratio* adalah ukuran perusahaan dan kenaikan harga saham. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham yaitu, aksi korporasi perusahaan, inflasi, proyeksi kinerja perusahaan dan tingkat bunga.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95) definisi kerangka pemikiran yaitu :

“Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

2.2.1 Dewan Direksi Berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Puteri (2013:594) menyatakan bahwa :

“Peningkatan jumlah direksi akan membawa keuntungan bagi entitas, sehingga laporan keuangannya akan semakin meningkat dengan baik dan berintegritas karena pengawasan direksi menjadi lebih baik”.

Menurut Manossoh, Hendrik (2016 : 102) menyatakan bahwa :

“Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi salah satunya dewan direksi akan membuat integritas laporan keuangan meningkat menjadi lebih baik lagi”.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penerapan tata kelola yang baik dapat menghasilkan integritas laporan keuangan yang terpercaya (Adrian, 2011 : 23).

Menurut Wulandari dan Budiarta (2014) Menyatakan bahwa kewenangan dewan direksi dapat menghindarkan terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dianggap dapat menyeimbangkan proses pengambilan keputusan khususnya dalam integritas informasi laporan keuangan.

Zuhdi, I., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2015) dan L Setiani (2019) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap integritas laporan keuangan.

2.2.2 Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Integritas Laporan

Keuangan

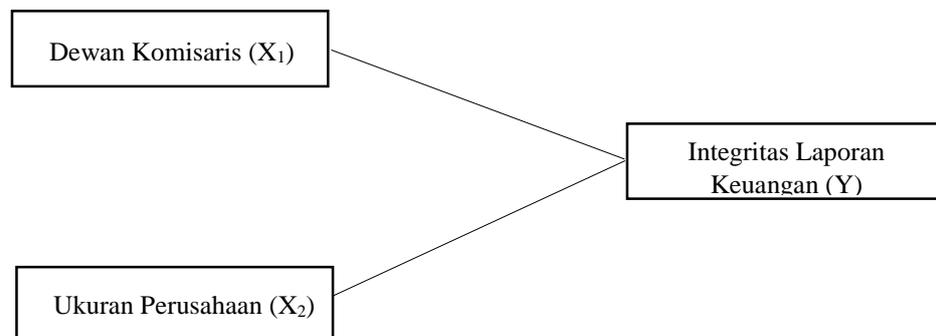
Menurut Halida, M (2020 : 6) menyatakan bahwa :

“Ukuran Perusahaan menunjukan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, maka semakin meningkat integritas laporannya karena manajer akan lebih konservatif dalam memilih laba agar menciptakan laporan keuangan yang reliable”.

Perusahaan biasanya memiliki pengalaman yang lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam perusahaan besar tuntutan *stakeholder* atas pengungkapan informasi laporan keuangan yang jujur juga akan semakin besar.

Ukuran perusahaan bisa menggambarkan informasi yang terdapat di dalam perusahaan serta pentingnya informasi tersebut bagi pihak-pihak baik internal maupun eksternal. Perusahaan yang berukuran besar akan semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi di perusahaan tersebut sehingga integritas laporan perusahaan akan meningkat (Santoso, S. D., & Andarsari, P. R. 2022).

Putri, M. N., & Andriani, W. (2022) dan Halim, K. I. (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap integritas laporan keuangan.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) definisi hipotesis yaitu :

“Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jika yang dihipotesisi adalah masalah statistik, hipotesis ini disebut hipotesis statistik”.

Dari uraian kerangka pemikiran diatas maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Integritas laporan keuangan.